

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2022

Dedy Harianto Hutasoit¹ Enzelina Sitanggang² Wira Hadi Sugara³ Putri Sari Margaret Julianty Silaban⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: dedyhutasoit1@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama 8 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, (2) variabel Pengeluaran Pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, (3) Rasio Gini variabel mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dan (4) variabel Jumlah Penduduk, Belanja Pemerintah, dan Gini Ratio secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

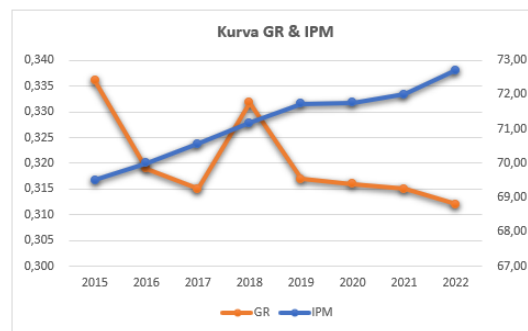
Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Pembangunan merupakan proses struktural dalam meningkatkan perekonomian yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti peningkatan taraf hidup atau penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul merupakan tanggung jawab yang harus dijawab oleh bangsa Indonesia dalam persaingan keberhasilan pembangunan negara. Perbaikan kesehatan juga edukasi harus dipandang sebagai modal untuk menambah kualitas sumber daya alam ukurannya berasal dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran harapan hidup, pendidikan serta standard hidup untuk setiap negara (UNDP, 1997). IPM dipergunakan buat mengetahui akibat yang dapat dilihat dari upaya memajukan sumber daya manusia. Dengan memberdayakan masyarakat, basis pembangunan berfokus pada peningkatan basis manusia. Perhitungan pertumbuhan didasarkan pada sejumlah ukuran pendidikan, kesehatan serta daya beli. Semakin besar nilai dilihat dari upaya memajukan sumber daya manusia. Dengan memberdayakan masyarakat, basis pembangunan berfokus pada peningkatan basis manusia. Perhitungan pertumbuhan didasarkan pada sejumlah ukuran pendidikan, kesehatan serta daya beli. Semakin besar nilai Menurut Sadono (2010), peningkatan produksi dan jasa di suatu negara disebabkan oleh perkembangan semua faktor yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, konstruksi, bangunan, pendidikan, barang modal, dll. Pertumbuhan ekonomi adalah selisih antara kegiatan ekonomi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa menyebabkan perekonomian tumbuh.

Isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah jumlah penduduk. Menurut Todaro dan Smith, penduduk merupakan mesin pertumbuhan karena pertumbuhan penduduk merupakan pasar potensial, sumber permintaan beraneka macam barang serta jasa, dan mendorong banyak perusahaan untuk mewujudkan skala ekonomi. Pada produksi yang menguntungkan seluruh pihak, memasok atau memasok produk yang cukup murah untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Berikut adalah tabel indeks pembangunan manusia, Gini Ratio, Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2015 - 2022, yaitu sebagai berikut:

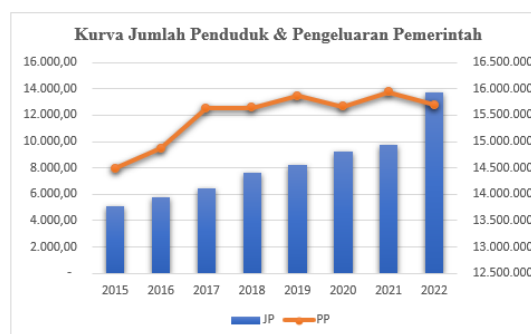
Tabel 1.

Tahun	IPM	GR	JP	PP
2015	69.51	0.336	13.766.851	7.959.17
2016	70.00	0.319	13.937.797	9.476.42
2017	70.57	0.315	14.102.911	12.518.86
2018	71.18	0.332	14.415.390	12.563.39
2019	71.74	0.317	14.562.550	13.440.32
2020	71.77	0.316	14.799.360	12.653.60
2021	72.00	0.315	14.936.150	13.749.50
2022	72.71	0.312	15.936.150	12.761.62

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia di Proovinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 8 tahun (2015-2022) selalu mengalami peningkatan. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 69,51 pada tahun 2015 menjadi 72,71 pada tahun 2022. Kemudian Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara periode 2015 - 2022 mengalami fluktuatif setiap tahun. Namun Gini Ratio terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,312 Selanjutnya jumlah penduduk dan pengeluaran Pemrintah Sumatera Utara dari 2015 hingga 2022 bergerak secara linier. atau selalu meningkat tiap tahunnya. Berikut grafik dari ke-empat variable diatas:



Gambar 1.



Gambar 2.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu: $IPM < 50$ (rendah), $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah) dan $IPM \geq 80$ (tinggi). IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004 $IPM = \frac{1}{3}(Y1+Y2+Y3)$). Dengan Penjelasan sebagai Berikut:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y1 = Indeks Harapan Hidup

Y2 = Indeks Pendidikan

Y3 = Indeks standar Hidup Layak

Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu (UNDP-2004) : Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah, kedua komponen tersebut membentuk Indeks Pendidikan . Dimensi standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita, yang di bakukan dalam Indeks Pendapatan.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah menggambarkan kebijakan dari pemerintah. Ketika pemerintah telah mencanangkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Adapun pengaruh pengeluaran Negara terhadap beberapa sektor (Boediono,1999).

Pengaruh Pengeluaran Negara Terhadap Perekonomian

Dalam pengeluaran negara, terdapat efek yang ditimbulkan terhadap perekonomian. Terdapat sektor perekonomian yang pada umumnya terpengaruh oleh pengeluaran negara, antara lain (Prasetya, 2012)

1. Sektor Produksi. Pengeluaran negara secara dapat berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). Pengeluaran pemerintah yang di tujukan untk sektor barang dan jasa tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap tingkat produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.

2. Sektor Distribusi. Dalam hal ini pengeluaran negara akan memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi akan membuat masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati barang/jasa yang dibutuhkannya, misalnya listrik, pupuk, BBM, dll.
3. Sektor Komsumsi Masyarakat. Dalam hal ini pengeluaran negara akan memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, menyebabkan masyarakat mampu untuk mengkonsumsi barang dan jasa lebih banyak lagi. Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun
4. Sektor Keseimbangan Prekonomian. Agar tercapainya peningkatan PDB, pemerintah harus mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya pemerintah mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (dalam sektor-sektor tertentu), pemerintah harus bisa mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tercapai, pemerintah dapat mengatur pembiayaan dengan pola defisit anggaran.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan

Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini berdasarkan pada kapasitas produksi kualitas manusia didalam proses pembangunan atau yang sering disebut investment in human capital yaitu suatu pemikiran dari Theodore Schultz di kutip oleh Sulaiman Asang (2012:25). Hal ini berarti potensi kemampuan manusia adalah suatu hal yang efisien dalam melakukan pembangunan disuatu wilayah (Asang, 2012). Dalam teori human capital ini menyatakan bahwa pendidikan formal adalah suatu faktor yang dikedepankan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital ini bisa diaplikasikan apabila terdapat sumber teknologi tinggi secara efisien dan adanya kualitas manusia yang dapat mengelola teknologi yang ada. Teori ini berkeyakinan bahwa investasi dalam hal pendidikan adalah suatu investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (Asang, 2012).

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Kesehatan

Kesehatan adalah suatu kebutuhan dasar bagi setiap kelangsungan hidup manusia, tanpa masyarakat yang sehat, suatu negara tidak akan mampu menghasilkan suatu produktivitas. Menurut Wahid suatu kegiatan ekonomi dalam suatu negara akan berjalan baik, jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduk atau masyarakatnya. Berdasarkan teori human capital menyatakan bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih utama dari faktor teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Wahid, 2012). Menurut Wahid dalam kasus negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah wajib menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dikonsepsi secara matang oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah (Wahid, 2012). Menurut Suparno (2014) mengatakan bahwasanya pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki pengaruh yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah Penduduk

Menurut Todaro dan Smith, Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan

atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun (Kumalasari, 2011). Menurut Maltus (dalam Arsyad, 2010) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas tingkat subsiten.

Gini Ratio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013). Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999). Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor faktor produksi (Todaro, 2000). Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Terdapat beberapa metode/teknik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu:

1. Kurva Lorenz: Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.
2. Gini Ratio: Gini Ratio digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2000). Rumus untuk menghitung Gini Ratio adalah sebagai berikut: $GR = 1 - \sum [Y_i + Y_{i-1}]$

Dimana:

F_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke- i

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke- i

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Yang artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Kriteria ketimpangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Nilai Koefisien	Kriteria Distribusi Pendapatan
< 0.4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0.4 - 0.5	Tingkat Ketimpangan Sedang
> 0.5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Hipotesis

1. Diduga Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
2. Diduga Jumlah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
3. Diduga Gini Ratio Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022
4. Diduga Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah dan Gini Ratio secara Bersama sama Signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2015-2022

METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pengaruh sistematis penelitian. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengertian penelitian studi kasus menurut Arikunto (2002) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Data Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan adalah jenis data sekunder deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan mengacu pada perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka angka atau pernyataan pernyataan yang dinilai dan analisis dengan analisis statistik. Data kuantitatif terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Gini Ratio Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang analisis datanya bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2012). Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan Gini Ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data time series pada tahun 2015 –2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Indeks Pembangunan Manusia dalam satuan persent, jumlah penduduk dalam satuan jiwa, jumlah pengeluaran pemerintah dalam satuan milyarad Rupiah dan Gini Ratio dalam satuan persen di Provinsi Sumatera utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara sumber lain yang berhubungan untuk memperoleh data sekunder dengan alat analisis yang digunakan Eviews 10.

Metode Analisa Regeresi Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan program Eviews 10. Secara umum persamaan regresi

linear berganda yang digunakan penelitian ini sebagai berikut: $Y_t = a + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3X_{3t} + e_t$. Keterangan:

- Y = Indeks Pemabnagunan Manusia
- A = Konstanta
- b1 = Koefisien Regresi Jumlah Penduduk
- X1 = Jumlah Penduduk
- b2 = Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah
- X2 = Pengeluaran Pemerintah
- b3 = Koefisien Regresi Gini Ratio
- X3 = Gini Ratio
- t = 1,2,3.....8 (time series 2015-2022)
- e = Faktor pengganggu di luar model (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas. Dari hasil analisis, nilai Prob. *Jarque Bera (JB)* > 0,05 artinya tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau data terdistribusi secara normal. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar 0,9079 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.
2. Uji Autokorelasi. Hasil uji *Autokorelasi* dengan kriteria nilai *Obs*R-Squared* > 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan tabel 3. Dapat diketahui bahwa nilai Prob. Sebesar 0,0929, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji Autokorelasi dalam model penelitian ini.
3. Uji Heteroskedastisitas. Hasil uji *Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey* dengan kriteria nilai *Obs*R-Squared* > 0,05 berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan tabel 3. Dapat diketahui bahwa nilai Prob. Sebesar 0,2728, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini
4. Uji Multikolinearitas. Hasil uji *Variance Inflation Factors* dengan kriteria nilai *Centered VIF* < 10, berarti tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa nilai *Centered VIF* Jumlah Penduduk sebesar 1,93 < 10, Pengeluaran Pemerintah sebesar 2,12 < 10 Gini Ratio sebesar 1,91 < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model Least Squares

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-219.5318	36.39232	-6.032366	0.0038
LOG(JP)	16.16091	2.223305	7.268868	0.0019
LOG(PP)	2.374267	0.562353	4.222021	0.0135
GR	6.051895	11.82154	0.511938	0.6357
R-squared	0.981064	Durbin-Watson stat		1.492096
F-statistic	69.07796	Prob(F-statistic)		0.000668
Asumsi Klasik:				
Normality Test	Jarque-Bera Probability			0.9079
Auto Korelasi (LM-Test)	Prob. Chi Square(2)			0.0929
Heteroskedasticity Tets	Prob. Chi Square(3)			0.2728
Multikolinearitas:				
JP	Centered Variance Inflation Factors			1.9319
PP	Centered Variance Inflation Factors			2.1226
GR	Centered Variance Inflation Factors			1.9187

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan. Berdasarkan Tabel 3. Dapat diketahui bahwa nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.0006 < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) dan variable Gini Ratio (X3) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka H_a diterima.
2. Uji Parsial. Berdasarkan pengujian regresi secara parsial diatas menunjukkan bahwa:
 - a. variabel Jumlah Penduduk (JP) berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. variabel JP dengan t hitung sebesar 7.268868 dan t tabel sebesar 2,77645, t hitung $> t$ table ($7.268868 > 2,77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ($0.001 < 0,05$).
 - b. variabel Pengeluaran Pemerintah (PP) terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. variabel Kurs dengan t hitung sebesar 4.222021 dan t tabel sebesar 2,77645, t hitung $> t$ table ($4.222021 > 2,77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari alpa 0.05 % ($0.013 < 0,05$).
 - c. Variabel Gini Ratio tidak berpengaruh (GR) dengan arah positif terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. variabel Gini Ratio dengan t hitung sebesar 0.511938 dan t tabel sebesar 2,77645, t hitung $< t$ table ($0.511938 < 2,77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari alpa 0.05 % ($0.635 > 0,05$).

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 3. Dapat diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.981064 menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X1), Pengeluaran Pemerintah (X2) dan variable Gini Ratio (X3) memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel IPM (Y) sebesar 98,1064%, dan sisanya sebesar 1,8936% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Variabel Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sumatera Utara tahun 2015-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM di Sumatera Utara dapat diterima dan teruji kebenarannya. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damara & Handoyo, 2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia nilai statistik 0.616. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel kepadatan penduduk mampu mempengaruhi 61,6% indeks pembangunan manusia. Begitu juga dengan hasil penelitian (Rizaldi Zakaria, 2018) yang dimana jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ yang artinya bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dengan nilai koefisien Jumlah Penduduk sebesar 0.0000206 yang artinya bahwa ketika jumlah penduduk meningkat satu jiwa maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.0000206. Begitu Juga dengan penelitian yang dilakukan (Irham & Putri, 2023) yang mengatakan kepadatan penduduk (variabel independen) berhubungan sangat kuat dengan indeks pembangunan manusia (variabel dependen), hal ini ditandai dengan nilai korelasi pearson 0.907 yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara kepadatan penduduk dan indeks pembangunan manusia,

Variabel Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sumatera Utara tahun 2015-2022, yang artinya hipotesis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap IPM di Sumatera Utara dapat diterima dan teruji

kebenarannya dan hal ini menunjukkan bahwasanya semakin tinggi pengeluaran pemerintah semakin tinggi pula indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara hal ini selaras dengan tinjauan pustaka pada penelitian (Dinamika et al., 2022) yang mengatakan Berdasarkan hasil estimasi, variabel pengeluaran pemerintah memiliki $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($5.448972 > 1.65255$), artinya variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Indonesia periode 2013-2018. Pada saat pengeluaran pemerintah meningkat IPM juga meningkat, dan juga penelitian kali ini selaras juga dengan penelitian yang dilakukan Pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap IPM juga disebutkan oleh Brata (dalam Ginting, 2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu determinan pembangunan manusia di Indonesia. Dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia.)

Variabel Gini Ratio Terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Penelitian ini Gini Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara hal ini dapat dilihat dari dan t tabel sebesar 2,77645, t hitung $< t$ table ($0.511938 < 2,77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari α 0.05 % ($0.635 > 0,05$). Artinya tidak selaras dengan hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian dari (KHUSNUL CHOTIMAH, 2017) yang mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa variabel Gini Ratio (GR) secara tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Timur bagian selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, serta mengacu pada data output hasil analisis secara parsial dan penelitian-penelitian terdahulu pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Jumlah Penduduk Berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara tahun amatan 2015-2022. Hasil analisis ini menunjukkan t hitung $> t$ table ($7.268868 > 2,77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari α 0.05 % ($0.001 < 0,05$). Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara tahun amatan 2015-2022. Hasil analisis ini menunjukkan t hitung $> t$ table ($4.222021 > 2,77645$) atau nilai signifikan lebih kecil dari α 0.05 % ($0.013 < 0,05$). Gini Ratio Tidak Berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara tahun amatan 2015-2022. Hasil analisis ini menunjukkan t hitung $< t$ table ($0.511938 < 2,77645$) atau nilai signifikan lebih besar dari α 0.05 % ($0.635 > 0,05$).

Saran: Dalam upaya peningkatan pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara, pemerintah provinsi yang bersangkutan hendaknya memperhatikan alokasi dana yang akan dikeluarkan. Alokasi dana tersebut hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap unsur-unsur yang merupakan konsep pembangunan manusia, yaitu pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah hendaknya selalu mengupayakan program sosialisasi tentang arti penting kualitas pendidikan dan kesehatan guna memaksimalkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan manusia di wilayah tersebut akan semakin membaik. Perlunya perwujudan Good Governance, dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam pelaksanaan pembangunan serta transparansi dibidang pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Boediono, "Teori Pertumbuhan Ekonomi", Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1985
- Damara, U., & Handoyo, P. (2023). Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia The Effect Of Population Density On Human Development Index In Indonesia. In *Journal of Nusantara Economic Science (JNES)* (Vol. 1, Issue 1).
- Dinamika, J., Pembangunan, E., Simarmata, Y. W., & Dinar Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Jumlah Penduduk, Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ipm: Analisa Two Stage Least Square Untuk Kasus Indonesia. In *Jdep* (Vol. 5, Issue 1).
- Dumairy, 1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan
- Ginting. (2008). *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*
- Irham, A. R., & Putri, R. M. (2023). Kepadatan Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. *Media Komunikasi Geografi*, 24(1), 91–100. <https://doi.org/10.23887/mkg.v24i1.60261>
- Khusnul Chotimah. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Serta Gini Ratio Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten-Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.
- Kumalasari, M. 2011. Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di jawa tengah. Semarang: Skripsi (S1). Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Rizaldi Zakaria. (n.d.). *Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sulaiman Asang, M.S, "Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Perspektif Organisasi Publik", Cetakan pertama, Brilian Internasional, Surabaya, 2012.
- Suparno, H. (2014). Pengaruh pengeluaran pemerintah sector pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembangunan manusia di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Ekonomika Bisnis*
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM
- Todaro, Michael. P. 1994. *Ekonomi untuk negara berkembang*. Edisi ketiga. Jakarta : Bumi Aksara
- UNDP. 1990 – 2009. *Human Development Report*. UNDP (On-line), diakses tanggal 23 Oktober 2023